

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini telah memberlakukan bentuk pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi yang ditandai dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota dituntut dapat melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Purba (2018), Pemerintah daerah dapat menyesuaikan pembangunan daerah sesuai dengan potensi keuangan daerah masing-masing. Ini adalah kesempatan bagus bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa mereka menjalankan kewenangan pemerintah. Kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintah daerah merupakan untuk ketentuan untuk berkembangnya suatu daerah.

Menurut Syarifudin (2020) adanya otonomi daerah, maka sangat dibuthkan akuntabilitas baik secara vertikal (Kepala pemerintah atas) maupun secara horizontal (Kepada masyarakat daerah) atas pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Terkait dengan masalah akuntabilitas peneggelolaan keuangan daerah tersebut maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang keuangan negara tahun 2003, presiden, gubernur, dan walikota wajib memuat paling sedikit laporan keuangan pada neraca, laporan realisasi APBN/APBD, laporan arus kas, dan informasi mengenai hal-hal berikut ini, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk catatan laporan keuangan. Kemudian pada tahun 2014 Undang-undang nomor 23 tentang pemerintahan daerah menetapkan bahwa salah satu tujuan pemerintah daerah adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, tugas nyata mewujudkan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Mardiasmo (2002) mengatakan instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dibutuhkan penanggungjawab masing-masing daerah atau penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah harus mencantumkan pernyataan pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh suatu daerah yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Darise dalam Hasanah, 2019). Akan tetapi diperlukan juga variabel independen seperti penerapan standar akuntansi pemerintah dan *Value for money* sehingga apabila

konsep ini berjalan dengan demikian tujuan dari variabel dependen akan terlaksana dengan baik.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pengetahuan yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Keharusan dan tuntutan pertanggungjawaban pelaporan keuangan daerah menggambarkan pentingnya penerapan standar akuntansi pemerintahan agar penilaian kinerja pemerintah daerah seragam, hal ini juga menuntut pejabat pemerintah terkait untuk menanggapi dengan serius dan membuat komitmen untuk menulis bagi yang membutuhkan atau berminat. Laporan keuangan pemerintah daerah. Keberadaan laporan keuangan tersebut memerlukan pertimbangan lebih lanjut, diyakini bahwa kegunaan laporan hanya merupakan kewajiban, dan tidak perlu menggunakan keuangan sebagai sumber informasi untuk menentukan dan merumuskan kebijakan pembangunan dan pemekaran wilayahnya.

Pemerintahan Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang ada di provinsi Sulawesi Selatan yang telah mendapatkan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sejak tahun 2016-2019, pemerintah kota palopo memperoleh predikat tersebut dari laporan keuangan pemerintah daerah untuk keempat kalinya secara berturut-turut (<https://radarluwuraya.com>, 2019). Predikat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini menjadi salah satu tolak ukur, untuk mengukur apakah kinerja keuangan pemerintah kota palopo memenuhi standar. Publik mempersepsi bahwa opini

WTP mencerminkan penggunaan keuangan yang benar, padahal berulang kali BPK mengingatkan bahwa lembaga yang mendapatkan opini WTP tidaklah dijamin bebas dari korupsi. Opini WTP hanya sekedar pernyataan BPK terhadap suatu pengelolaan keuangan negara, termasuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan tiap-tiap lembaga. Namun masih banyak daerah yang sudah meraih opini WTP tetapi banyak ditemukan masalah dalam pengelolaan keuangan pemerintah dikutip dalam (<https://www.cnbcindonesia.com>, 2019) oleh karena itu peneliti mengambil objek pada Kantor BPKAD Kota palopo.

Agar semua pelaksana keuangan daerah mampu mengelola keuangan harus memahami standar akuntansi, oleh sebab itu pengelola keuangan mengenai standar akuntansi keuangan daerah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Adapun beberapa penelitian yang mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel Penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pramudita (2017) ; dan Zeyn (2011) menyimpulkan bahwa penerapan Standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Budiantara (2015) menyatakan bahwa Standar akuntansi pemetintah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Menurut Primayani (2014) dan Shinta (2017) menyimpulkan bahwa *value for money* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan menurut Mulyani (2018) menyatakan bahwa bahwa *value for money*

tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena diatas dan adanya perbedaan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Palopo (Studi Kasus Pada Kantor BPKAD Kota Palopo)**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
2. Apakah *Value For Money* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
3. Apakah Penerapan Standar akuntansi pemerintah dan *Value for money* berpengaruh secara simultan atau parsial terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar akuntansi pemerintah terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Value for money* terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar akuntansi pemerintah dan *Value for money* secara simultan atau parsial terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan *value for money* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hasil ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dilakukannya penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan bidang ekonomi, khususnya pada ilmu akuntansi sektor publik mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah studi literatur bagi peneliti selanjutnya mengenai Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memberikan bukti teoritis bagi penelitian selanjutnya dibidang yang sama dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Daerah di Kota Palopo sehingga diharapkan dapat menjadi suatu tolak ukur serta sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4.2.2 Bagi masyarakat sebagai pemangku kepentingan eksternal, hasil studi tersebut diharapkan dapat membantu menguji tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mendorong lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memantau dan mendorong kinerja keuangan daerah palopo.

5.1 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mencakup pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini hanya dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Palopo.

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada serta pembahasannya, sehingga peneliti tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini pada variabel bebas yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) dan *Value For Money*(X_2), Sementara variabel terikatnya adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan pada tingkah laku dan premis oleh Donaldson & Davis, 1991. *Stewardship theory* adalah situasi yang menggambarkan dimana manajemen tidak dimotivasi oleh tujuan pribadi, tetapi diarahkan pada tujuan utama organisasi dan diarahkan pada hasil utamanya. Karena itu, teori memiliki dasar sosiologi dan psikologis, dan tujuan rancangannya adalah untuk memotivasi para eksekutif sebagai manajer untuk bertindak sesuai dengan keinginan atasan. Selain itu, perilaku tidak akan meninggalkan organisasi karena pengurus akan berusaha keras mencapai tujuan organisasinya. Keberhasilan organisasi menggambarkan efektivitas maksimal dari tim manajemen.

Teori *Stewardship* telah muncul di bidang tata kelola perusahaan sebagai alternatif teori keagenan, sehingga dapat dipahami bahwa asumsi dasar didefinisikan sebagai berlawanan dengan asumsi teori agensi. Dalam hal ini, perbedaan utama antara teori agensi dan *stewardship* terletak pada mekanisme pengelolaan resiko: teori keagenan mempromosikan mekanisme kontrol yang mengakibatkan biaya baru muncul lagi sementara teori *stewardship* mempromosikan pengembangan kepercayaan (Davis *et al*, 1997).

Menurut (Podrug,2011) dengan berdasarkan dari teori *sterwardship* adalah bahwa para manajer selalubertindak sedemikian rupa untuk memaksimalkan kepentingan perusahaan dan lingkungan bisnis kontemporer memaksa manajemen menuju bisnis yang bertanggung jawab secara etis, inovatif, Tetapi pada saat yang sama juga baik bahwa manajer yang berhasil meningkatkan kinerja organisasi biasanya dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar kelompok, karena kepentingan sebagian besar kelompok pemangku kepentingan dapat dipenuhi dengan baik dengan meningkatkan kekayaan organisasi.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Menurut Muliyani (2018), terjalannya relasi antar manusia merupakan relasi antar sesama, karena karakteristik masyarakat dapat dipercaya oleh pihak lain, khususnya dibidang keuangan, pemerintah diharapkan dapat menciptakan transparansi bagi masyarakat sesuai dengan harapan dan keyakinannya. Akuntansi merupakan suatu penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak ke arah yang semakin kompleks serta diikuti dengan tumbuhnya

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah dapat menafsirkan tujuan ekonomi, pelayanan publik dan kesejahteraan dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan memberinya tanggungjawab keuangan, sehingga menjelaskan bahwa pemerintah daerah (pengelola) dapat dipercaya dan sejalan dengan kepentingan umum. Keberadaan institusi, masyarakat dapat

merealisasikan dengan baik (Lewier, 2016). Melalui laporan keuangan yang dilaporkan pemerintah yang mempertanggungjawabkan kinerjanya, masyarakat dapat mengevaluasi, mengukur, dan memantau sejauh mana pemerintah daerah mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya (Kurniawati 2016). Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut maka seorang penatalayanan mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat (Wardana, 2016). Oleh sebab itu sebagai pengelola keuangan pemerintah daerah harus menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat sebagai *stakeholder*.

2.2 Standar Akuntansi Pemerintah

2.2.1 Pengertian standar akuntansi pemerintah

Standar akuntansi sangat penting sebagai standar dan mekanisme kontrol dalam penyusunan laporan keuangan. Kurangnya standar akuntansi yang tepat akan berdampak negatif berupa rendahnya reliabilitas dan sulitnya pengendalian informasi keuangan (Mardiasmo, 2007). Jika organisasi memahami standar atau opini seperti halnya pembuat laporan keuangan, maka pengguna laporan keuangan eksternal organisasi akan dapat memahami informasi yang diberikan (Abdul Halim, 2012: 225). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dimaksud Penerapan Standar akuntansi pemerintah adalah: Prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian prosedur, operator, alat dan elemen lain yang sistematis untuk mewujudkan fungsi akuntansi dari saat analisis transaksi hingga pelaporan keuangan dalam organisasi pemerintah. Dalam Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan berbasis *cash to accrual*. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terdapat pada lampiran I dan berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan serta dapat langsung diterapkan oleh masing-masing entitas.

Laporan Keuangan yang dihasilkan dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah Berbasis Akrual adalah standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pusat guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini harus dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan

kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Standar akuntansi pemerintahan dituangkan dalam bentuk “Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan” (PSAP), nama, nomor dan tanggal efektif standar akuntansi pemerintahan (Nurlaila, 2014).

2.2.2 Penerapan standar akuntansi pemerintah

Menurut Weskornis (2018), penerapan standar akuntansi pemerintahan mengharuskan semua organisasi yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait memiliki pemahaman yang utuh. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah wajib dilaksanakan, namun dalam penerapannya perlu dipahami beberapa alasan penting sehingga diharapkan dapat membantu penerapan standar akuntansi pemerintahan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang tepat dalam memenuhi kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangann pemerintah (Mahmudi, 2011:271).

Penerapan standar akuntansi pemerintah diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel bagi pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2.3 Kandungan di dalam standar akuntansi pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Angelicca (2019) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat tiga belas kerangka konseptual dan tiga belas PSAP yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) , dalam penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur PSAP.

b. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

c. PSAP No.02 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan realisasi pendapatan ,belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode . Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos yaitu: pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA / SiKPA).

d. PSAP No.03 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran.

e. PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

f. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau pengurusannya berpindah.

g. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

h. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

i. PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; biaya perolehan tersebut.

j. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/ atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

k. PSAP No.10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Kesalahan dalam hal kemunculannya dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu: kesalahan tidak berulang dan kesalahan sistematis dan berulang. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak terjadi lagi yang dikelompokkan menjadi dua kelompok yang harus diungkapkan tersendiri dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Peristiwa luar biasa harus memenuhi semua persyaratan berikut.

1. Bukan aktivitas normal entitas;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi lagi;

3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
4. Memiliki pengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset / kewajiban.

I. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

m. PSAP No.12 Laporan operasional

memberikan informasi tentang semua aktivitas operasional keuangan entitas pelapor, yang tercermin sebagai berikut:

1. Pendapatan LO
2. Beban
3. Surplus / defisit operasional suatu entitas pelapor yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya
4. Kegiatan non operasional
5. Surplus / defisit operasional sebelum pos luar biasa
6. Pos luar biasa
7. Surplus / defisit laporan operasional

n. PSAP No. 13 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Neraca Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga BLU sekarang melaporkan 7 laporan keuangan yang

disajikan dengan basis akrual. Laporan keuangan yang dipengaruhi oleh peristiwa atau peristiwa terkait. Dalam menentukan apakah suatu peristiwa atau peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, aspek materialitas perlu diperhatikan.

Menurut Nunuy Nur Afiah (2009: 27), standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah pada dasarnya mengatur tiga hal sebagai berikut:

1. Pengakuan

Pengakuan adalah proses untuk menentukan apakah memenuhi kriteria pencatatan satu atau lebih peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian tambahan dari aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, pengeluaran dan elemen pembiayaan, yang akan dimasukkan dalam entitas pelapor yang relevan. Laporan keuangan. Konfirmasi tercermin dalam catatan jumlah item.

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan nilai moneter setiap item yang akan dikonfirmasi dan dimasukkan dalam laporan keuangan. Item-item dalam laporan keuangan diukur dengan menggunakan biaya historis. Aset dicatat sebesar nilai wajar dari jumlah kas yang dikeluarkan dan setara kas atau imbalan yang dibayarkan untuk membeli aset tersebut. Kewajiban disajikan sebesar nilai nominal.

3. Pengungkapan

Laporan keuangan memberikan informasi lengkap yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar depan laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

2.3 Value For Money

2.3.1 Pengertian *Value for money*

Organisasi sektor publik sering dinilai sebagai sarana inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi sehingga adanya tuntutan baru agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya (Sayuti, 2018). Menurut Mardiasmo (2009: 127) *value for money* merupakan inti dari pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari keluaran yang dihasilkan saja, tetapi harus mempertimbangkan masukan, keluaran dan hasil bersama-sama. Indra (2006: 280) menyatakan bahwa *value for money* merupakan tolak ukur dalam anggaran untuk organisasi sektor publik. Menurut Mahsun (2006: 132), *value for money* merupakan ukuran kinerja yang didasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Namun target capaian anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran daerah harus dimonitor secara periodikal dengan membandingkan antara capaian dengan target anggaran, serta melihat dengan persentase target capaian tahun sebelumnya (Syahputra, 2018).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *value for money* merupakan penerapan dari tiga konsep pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan dan sektor publik yaitu ekonomis, efisien dan efektif.

2.3.2 Konsep *value for money*

Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2009, 4) *value for money* merupakan konsep prinsip-prinsip manajemen organisasi sektor publik yang fundamental terhadap tiga elemen utama, yaitu:

a. Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan input (biaya input). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik. Dalam konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi adalah seberapa besar anggaran dialokasikan untuk membiayai kegiatan tertentu.

b. Efisiensi

Efisiensi adalah rasio keluaran / masukan yang digunakan dengan mengacu pada standar atau target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau pekerjaan tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah mungkin.

c. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi keluaran untuk pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program

atau kegiatan tersebut. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dianggap efektif apabila keluaran yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

2.3.3 Manfaat penerapan konsep *value for money*

Menurut Mardiasmo (2009), Manfaat Implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya efisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.4.1 Pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan

Definisi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah akuntabilitas kepada publik atau setiap aktivitas yang dilakukan. Menurut Nordiawan (2008) akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Akuntabilitas Menurut Bastian (2010) dapat diartikan

sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pemimpin kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan adalah kewajiban pemerintah kepada masyarakat untuk mempertanggungjawabkan atau mempertanggungjawabkan atau menjelaskan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi. Dengan kata lain akuntabilitas adalah pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah.

2.4.2 Indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan

Menurut Wahida (2015) indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan terdiri dari:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (akuntabilitas untuk probabilitas dan legalitas) Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lain yang diperlukan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Proses Akuntabilitas, Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses diwujudkan

melalui penyediaan layanan publik yang cepat, tanggap, dan berbiaya rendah.

3. Program akuntabilitas (program akuntabilitas), Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak dan apakah alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal telah dipertimbangkan.

4. Akuntabilitas kebijakan, Kebijakan Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR / DPRD dan masyarakat luas.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pramuditia(2017) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi , <i>Value For Money</i> ,Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Hal ini di karenakan pemerintah telah mampu menerapkan basis kas

	Pemerintah Daerah (OPD Kabupaten Ponogoro)		untuk mengakui pendapatan , belanja dan pembiayaan dan selalu mengoreksi setiap kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Variabel <i>value for money</i> tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2	Zeyn (2011) Pengaruh <i>Good Governance</i> Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>good governance</i> dengan organisasi komitmen memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
3	Mulyani (2018) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, <i>Value For Money</i> , Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Skpd Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018)	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. <i>Value For Money</i> tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan

			keuangan daerah.
4	Saputra J(2015) Pengaruh <i>Value For Money</i> (Ekonomis, Efisiensi Dan Efektivitas) Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang	Metode Kuantitatif	Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan; (1) secara parsial <i>value for money</i> (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
5	Rinaldi (2016) Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> , Audit Kinerja Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kota Surakarta)	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh penerapan <i>good governance</i> , audit kerja dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kota surakarta.
6	Budiantara (2015) Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Kinerja	Metode kuantitatif	Hasil penelitian ini variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dtetapi tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja.
7	Shintia(2017) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Pengendalian Internal Dan	Metode kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel <i>value for money</i> berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

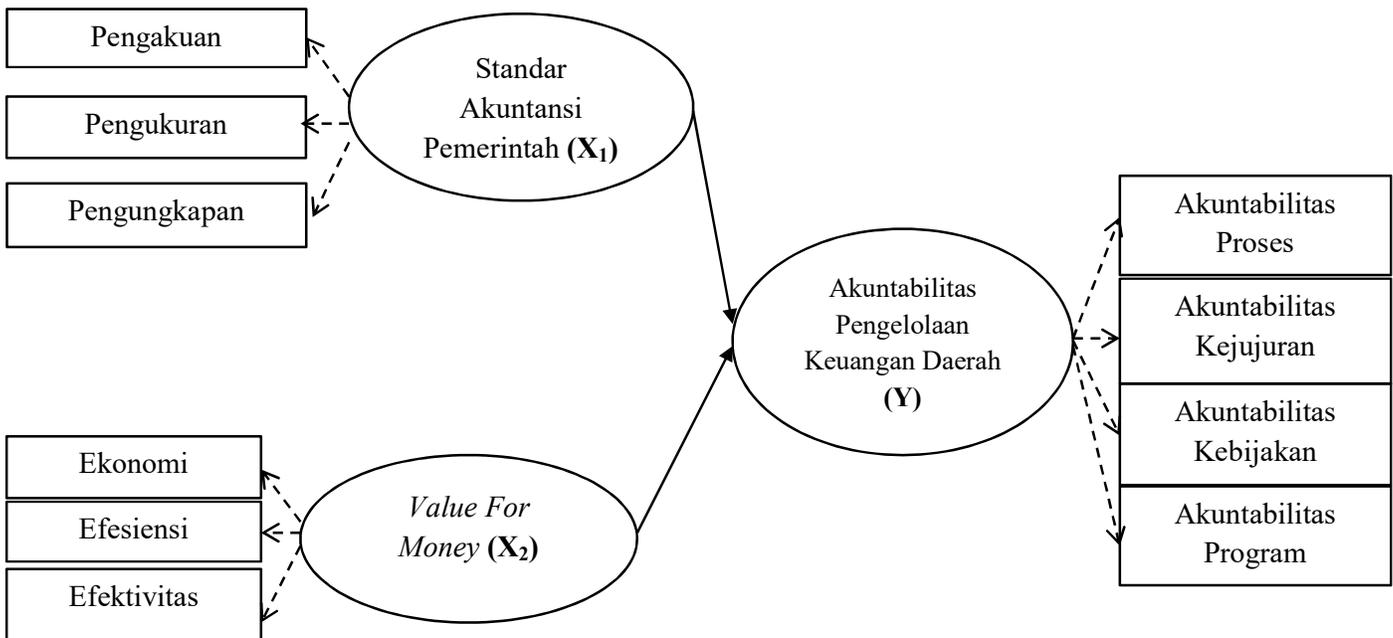
	<i>Value For Money</i> Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Kudus)		pengelolaan keuangan.
8	Ichlas M, Dkk (2014) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintah kota banda aceh.
9	Primayani, dkk (2014) Pengaruh Pengendalian Internal, <i>Value For Money</i> , Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung)	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan <i>value for money</i> berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten klungkung.
10	Nurwulan, Dkk (2019) Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kinerja	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja <i>value for money</i> berpengaruh secara signifikan terhadap

	<i>Value For Money</i> Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survey Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, Badan Pendapatan Daerah Dan Inspektorat Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi)		akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
--	---	--	--

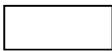
2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Sugiyono, 2013). Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyebutkan bahwa laporan dari pemerintah pusat dan daerah merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa variabel yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan *Value For Money* (X2) pada kantor BPKAD Kota Palopo untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Untuk memudahkan kegiatan penelitian, bentuk kerangka penelitian konseptual dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 2.1 Kerangka Konsep



Keterangan Gambar :

-  : Variabel penelitian
-  : Indikator
-  : Garis pengaruh
-  : Garis indikator

2.7 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2012:159) Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian. Kebenaran hipotesis harus dibuktikan melalui data yang dikumpulkan.

2.7.1 Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan bertujuan umum dalam rangka meningkatkan daya banding laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode dan antar entitas. Laporan keuangan bertujuan umum adalah laporan keuangan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan umum sebagian besar pengguna laporan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan semua pertimbangan penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan komitmen organisasi yang tinggi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, yang artinya komitmen organisasi yang merupakan variabel kontinjensi sangat mempengaruhi akuntabilitas keuangan yang mana pemahaman dan penggunaan SAP mutlak dilakukan agar laporan keuangan berkualitas dan dapat menilai kinerja aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa (Zeyn, 2011). Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris di atas, maka dapat dibangun hipotesis:

H1: Penerapan Standar Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

2.7.2 Pengaruh *value for money* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat, menyebabkan persaingan semakin ketat. Hal tersebut berdampak pada menurunnya akuntabilitas publik dan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh organisasi sektor publik dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan perusahaan (Primayani, et al, 2014). Untuk mencapai akuntabilitas publik yang baik digunakan pengukuran kinerja *value for money*. Konsep *value for money* dapat membantu proses manajemen anggaran untuk memberikan output terbaik dan efektif sesuai permintaan dengan biaya terendah, memelihara sumber daya, dan menghindari aktivitas tanpa tujuan dan pengangguran sumber daya.

Selain itu, konsep *value for money* dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerja karyawan, melaksanakan program yang memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah, sistem pengendalian manajemen yang memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau tingkat efektivitas program. Pelaporan keuangan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Primayani et al (2014) menyatakan *value for money* berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan dukungan teoritis dan bukti empiris di atas, maka dapat dibangun hipotesis:

H2: *Value for money* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian berdasarkan filosofi positivis, digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, biasanya teknik pengambilan sampel secara acak, pengumpulan data menggunakan alat penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dan tujuannya untuk menguji hipotesis berikut: kelompok. Filsafat positivisme percaya bahwa realitas / gejala / fenomena dapat diklasifikasikan, relatif tetap, spesifik, teramati, terukur dan sebab akibat. Penelitian biasanya dilakukan pada populasi atau sampel yang representatif (Sugiyono, 2013).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berada di Jl. Jend Sudirman No.163, Kota Palopo, Sulawesi Selatan dengan waktu penelitian \pm 2 (Dua) bulan terhitung mulai dari bulan Juli hingga Agustus 2020.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di kantor BPKAD Kota Palopo yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Kepala BPKAD, Sekretariat, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Aset Daerah dan Bidang Akuntansi sebanyak 112 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017). Pengambilan sampel digunakan teknik pengambilan sampel pengambilan sampel acak sederhana untuk pengambilan sampel. Alasan dikatakan sederhana (*simple*) adalah karena anggota populasi diambil sampelnya secara acak tanpa mempertimbangkan kelas-kelas yang ada dalam populasi. Cara ini akan dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Pengambilan sampel acak sederhana dapat dilakukan melalui undian, pemilihan nomor dari daftar nomor acak, dll (Sugiyono, 2017). Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus slovin, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \quad (1)$$

Dimana:

n : Ukuran sampel

N: Ukuran populasi

e : Persentase ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir atau diujikan, untuk penelitian ini digunakan 10%.

Persentase kelonggaran ketidakteelitian menggunakan 10% karena dari hasil yang didapatkan sudah mewakili populasi. Maka besarnya sampel dalam penelitian ini, adalah:

$$n = \frac{112}{1 + 112 \cdot 0,1^2}$$

$$n = \frac{112}{1 + 1.12}$$

$$n = 52.83$$

Dari hasil perhitungan sampel diatas, maka dapat diketahui jumlah sampel yang harus digunakan dalam penelitian ini yaitu 53 (dibulatkan) yang berperan dalam kantor BPKAD Kota Palopo.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Kemudian data yang berupa angka dianalisis dengan metode statistik. Penelitian ini bertujuan menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan hubungan antara variabel dan ada pula yang bersifat mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal (Sugiyono, 2012).

Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa sumber primer adalah sebagai berikut: “Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung menyediakan data

untuk pengumpulan data.” Pengumpulan data utama dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara langsung dengan semua pihak yang terlibat dalam penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, yaitu berupa jawaban dari responden terhadap pernyataan yang terdapat dikuesioner yang dibagikan dan dikumpulkan dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Palopo. Adapun sumber data dari artikel, jurnal, skripsi, dan tesis yang diterbitkan dan dipublikasikan serta melalui buku yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer melalui:

3.5.1 Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2013).

3.5.2 Kuesioner (*questionnaire*)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden auditor. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dijawab dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden (Sugiyono, 2012). Jika peneliti mengetahui dengan pasti variabel mana yang akan diukur dan apa yang dapat diperoleh dari narasumber, maka kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efektif. Selain itu, jika jumlah responden cukup banyak dan tersebar di wilayah yang luas maka kuesioner juga sesuai Pertanyaan / pernyataan tertutup atau terbuka dapat diberikan kepada orang yang diwawancarai secara langsung, atau dikirim melalui surat atau Internet.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel penelitian

Menurut Sugiyono (2013), variabel penelitian adalah adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas (*Independen Variabel*), adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (*Independen variabel*) adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) dan *Value For Money*(X_2).
2. Variabel Terikat (*Dependen Variabel*), adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (*dependent variabel*) adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y).

3.6.2 Definisi operasional variabel

Berikut ini adalah definisi operasional variabel dari penelitian ini:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadikan tolak ukur dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabelnya pengelolaan keuangan daerah agar mewujudkan pemerintahan yang baik.
2. *Value For Money* (X_2), *Value For Money* dalam penelitian ini adalah konsep dasar dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik.
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam penelitian ini adalah mempertanggung jelaskan, menyajikan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas proses pengelolaan keuangan.

3.7 Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan instrument berupa angket atau kuesioner, instrument dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Instrument Penelitian

Variabel	Indikator	Skala	Sumber
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1)	1. Pengungkapan 2. Pengukuran 3. Pengakuan	Skala Likert	Nunuy Nur Afiah (2009:27)
<i>Value For Money</i> (X_2)	1. Ekonomi 2. Efisiensi 3. Efektivitas	Skala Likert	Mardiasmo (2009, 4)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan	Skala Likert	Menurut Wahida (2015)

Kuesioner yang digunakan adalah model skala *likert*. Kuesioner tersebut berisipernyataan-pernyataan dan responden harus menjawab dengan alternatif jawaban yang disediakan mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju dengan skor dari 1 sampai 5. Berikut ini adalah kelima alternatif jawaban tersebut:

1. Sangat Setuju (SS) = 5
2. Setuju (S) = 4
3. Kurang Setuju (KS) = 3
4. Tidak Setuju (TS) = 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS versi 20 for windows, program komputer yang digunakan untuk menganalisis data dengan analisis statistik.

3.8.1 Uji instrumental Penelitian

1. Uji Validitas

Skala pengukuran disebut valid jika melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang harus diukur. Jika skala pengukuran tidak valid maka tidak berguna bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan (Kuncoro, 2013).

2. Uji Reabilitas

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas skor (skala pengukuran). Reabilitas berbeda dengan validitas karena yang pertama berfokus pada masalah konsistensi, sedangkan yang kedua lebih mementingkan masalah akurasi (Kuncoro, 2013).

3.8.2 Uji asumsi klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, outokorelasi, tidak mengandung heteroskedastisitas, dan linieritas (Suliyanto, 2011).

Uji asumsi klasik meliputi:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng (*bell-shaped curve*) yang kedua sisinya melebar sampai tidak terhingga. Uji normalitas disini tidak dilakukan per variabel tetapi hanya terhadap nilai residual terstandarisasinya (Suliyanto, 2011).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam modal regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak maka regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier (Suliyanto, 2011). Multikolinieritas akan membuat variabel-variabel independen tidak sama dengan nol. Mendeteksi adanya multikolinieritas dapat digunakan nilai tolerance dan *varian inflation factor* (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai tolerance lebih dari sama dengan 0,10 dan nilai VIF kurang dari sama dengan 10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2011).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* merupakan uji statistik yang digunakan untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kebalikan dari uji ini adalah *homoskedastisitas*, yaitu

terjadi jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Di dalam analisis regresi, model yang tepat dalam menerangkannya adalah jika tidak terjadi *heteroskedastisitas* atau model regresi yang terjadi *homoskedastisitas*. Pelaksanaan uji ini dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara lain prediksi variabel terkait (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID.

3.8.3 Uji regresi linear berganda

Regresi linier berganda merupakan sebuah regresi yang mana jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksikan variabel tergantung dipengaruhi dua atau lebih variabel bebas (Suliyanto, 2011). Sehingga persamaan regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + e \quad 2$$

Keterangan:

- Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
- α : Konstanta
- $\beta_1\beta_2$: Koefisien regresi
- x_1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
- x_2 : *Value For Money*
- e : Eror

3.8.4 Uji hipotesis

1. Uji koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel bebas (Suliyanto,2011). Untuk menghitung koefisien determinasi diperlukan nilai kuadrat selisih Y riil dengan nilai Y prediksi dan nilai kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y rata-rata.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara parsial (individual) dalam menerangkan variabel dependen. Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial atau individu menerangkan pengaruh terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan yaitu dengan nilai signifikansi 0,05 dan membandingkan t hitung dengan t tabel yang ditentukan sebagai berikut, Apabila tingkat signifikansi $< \alpha$ (0,05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila tingkat signifikansi $> \alpha$ (0,05) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

3. Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian bersama-sama variabel independen yang dilakukan untuk melihat variabel independen. Pengujian ini hanya digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah tepat. Kriteria dalam menguji statistik F sebagai berikut, bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas $<$ nilai signifikan (0,05), maka hipotesis tidak dapat ditolak, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel

dependen. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $>$ nilai signifikan (0,05), maka hipotesis diterima, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor BPKAD Kota Palopo

4.1.1 Sejarah singkat BPKAD Kota Palopo

Pada awal dibentuknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Setelah adanya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).

4.1.2 Visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

a. Visi

” Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga, Dan Agroindustri Yang Berwawasan Agama, Budaya, Dan Lingkungan Yang Berkemuka Di Indonesia”.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) aparat pelaksana pengelola keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
3. Meningkatkan profesionalisme pelayanan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.

4.1.3 Struktur Organisasi BPKAD Kota Palopo

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo terdapat susunan organisasi yang terdiri dari:

a. Kepala Badan

Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Tugas Pokok, Melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

3. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan fungsional dibidang pengelolaan keuangan daerah;
4. Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. Sekretaris

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Tugas pokok, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan seluruh datuan organisasi dalam lingkup Badan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Tindak lanjut dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai Fungsi:

1. Pelaksanaan urusan Sekretariat, rumah tangga dan aset badan;
2. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut;
3. Pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dan surat menyurat;
4. Penyusunan program dan rencanan kerja serta kebutuhan anggran dan;
5. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan.

c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Badan. Kepala bidang anggaran dan perbendaharaan mempunyai Tugas pokok, menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD, mengordinasikan dan memverifikasi RKA, DPA dan DPPA, menyiapkan data untuk penerbitan SPD, anggaran kas, serta menyiapkan data petunjuk teknis yang berkaitan dengan pinjaman atas nama Pemerintah Kota. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai Fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan APBD;
 2. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 3. Pengoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah;
 4. Pengoordinasian penyusunan standar biaya masukan dan pedoman lainnya terkait pelaksanaan anggaran;
 5. Pengoordinasian dan pelaksanaan perbendaharaan daerah.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai Tugas Pokok, memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas badan dalam lingkup pelaksanaan kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi, penyusunan laporan dan penyajian informasi keuangan daerah, dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Kepala bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan sistem Akuntansi pemerintah kota;
2. Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah pemerintah kota;
3. Pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah kota dan pelaporan kinerja keuangan pemerintah kota;
4. Pembinaan dalam rangka pelaporan BLUD;
5. Pelaksanaan pengoordinasian dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

e. Bidang Aset Daerah

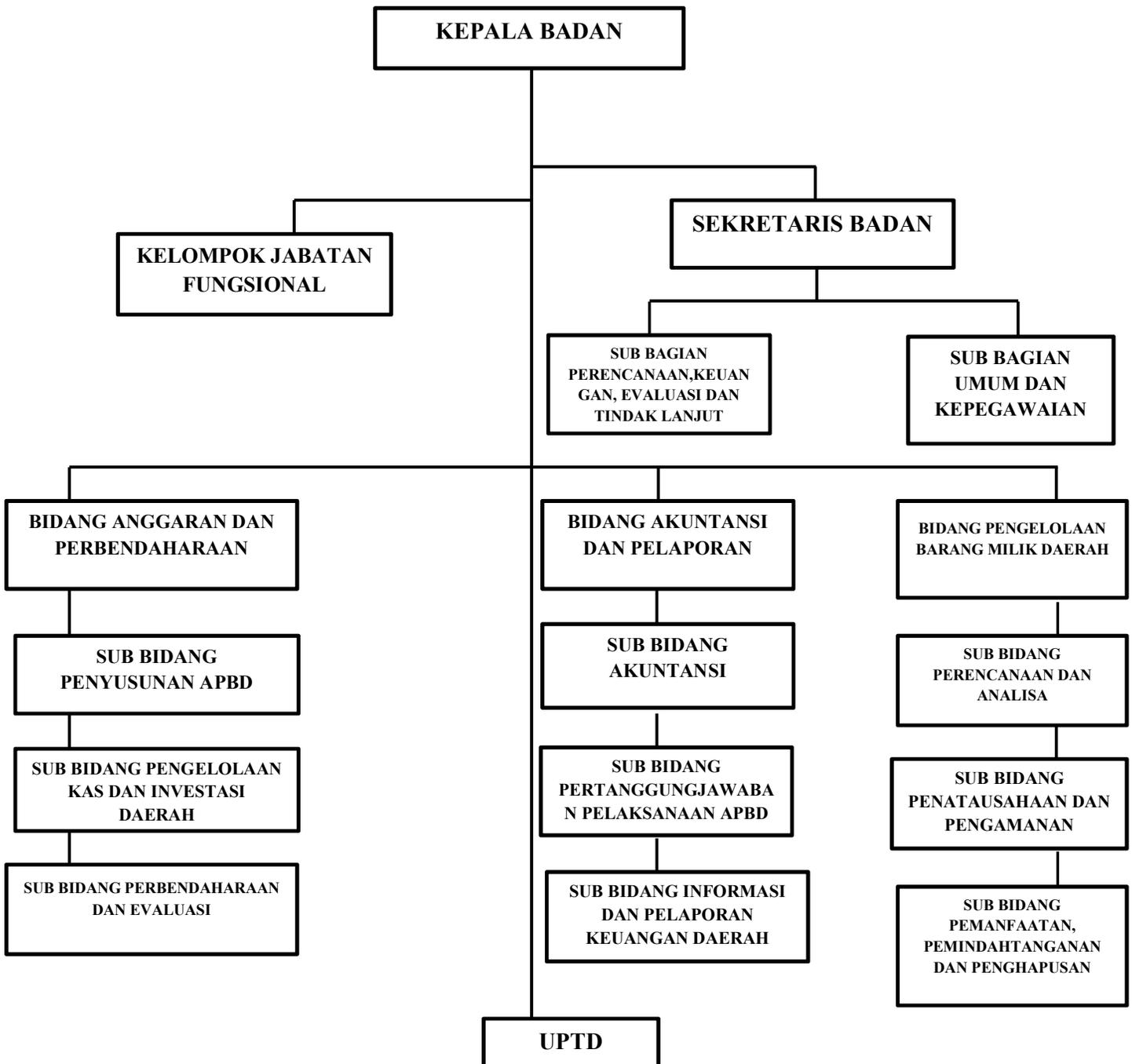
Bidang aset daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala bidang aset daerah mempunyai Tugas pokok, memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas badan dalam lingkup perencanaan dan analisa, penatausahaan dan pengamanan serta pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala bidang aset daerah mempunyai Fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pedoman pengelolaan barang milik daerah;
3. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan aset daerah;

4. Pelaksanaan administarasi pengelolaan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan manajemen pengelolaan barang milik daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi BPKAD Kota Palopo dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Palopo



4.2 Deskripsi Data

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada kantor BPKAD Kota Palopo. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner pada Kantor BPKAD sebanyak 53 eksamplar dan diberikan pada pegawai yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dapat digunakan sebanyak 45 eksamplar, atau tingkat pengembalian data kuesioner sebanyak 85%. Adapun rincian dapat dilihat:

Tabel 4.1 Pengumpulan Data Primer Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase %
1.	Distribusi Kuesioner	53	100%
2.	Kuesioner Kembali	45	85%
3.	Kuesione Yang Tidak Kembali	8	18%
4.	Kuesioner yang dapat diolah	45	85%
n sampel yang kembali = 45			
Responden rate = $\frac{45}{53} \times 100\%$			
= 85%			

Sumber: Data yang diolah (2020)

Dari 53 kuesioner yang dibagikan kepada pegawai yang kerja di Kantor BPKAD Kota Palopo, terdapat 8 kuesioner yang cacat atau tidak kembali dikarenakan pada saat dilakukan penelitian tidak semua pegawai berada ditempat. Sebanyak 45 orang pegawai yang bekerja di Kantor BPKAD Kota Palopo berhasil dikumpulkan sebagai responden dalam penelitian.

Dari 3 variabel yang diamati dalam penelitian dan dengan rincian jumlah pertanyaan untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X_1) ada 10 butir pertanyaan, variabel *value for money* (X_2) ada 10 butir pertanyaan dan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) ada 11 butir pertanyaan. Hasil jawaban dari responden pada variabel Penerapan standar akuntansi pemerintah (X_1) dapat diketahui bahwa yang menjawab “Sangat Setuju” sebanyak 244 kali, yang menjawab “Setuju” sebanyak 194 kali dan yang menjawab “Kurang Setuju” sebanyak 12 kali, Hasil jawaban responden pada variabel *value for money* (X_2) diketahui yang menjawab “Sangat Setuju” sebanyak 209 kali, yang menjawab “Setuju” sebanyak 198 kali, yang menjawab “Kurang Setuju” sebanyak 42 kali dan yang menjawab “Tidak setuju” sebanyak 1 kali, dan Hasil jawaban dari responden pada variabel Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) diketahui yang menjawab “Sangat Setuju” sebanyak 265 kali, yang menjawab “Setuju” sebanyak 206 kali, dan yang menjawab “Kurang setuju” 20 kali. Kuesioner dengan 31 butir pertanyaan tersebut direkapitulasi atau dibuat tabulasi untuk mengetahui nilai angket berdasarkan frekuensi jawaban responden dan persentase jawaban responden pada tiap pertanyaan. Demografi responden dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Demografi Responden

Keterangan	Jumah (orang)	Persentase(%)
Jenis Kelamin :		
a. Laki-laki	22	49%
b. Perempuan	23	51%
Total	45	100%

Tingkat Pendidikan		
a. SMA/Sederajat	15	33%
b. Diploma	2	4%
c. Strata -1 (S1)	26	58%
d. Strata -2 (S2)	2	4%
Total	45	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

4.2.1 Uji statistik deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagai mana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum Sugiono (2012). Analisis statistik deskriptif ini meliputi tabel, grafik, rata-rata (*mean*), standar deviasi nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah penelitian sehingga penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif yang diolah dengan menggunakan SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.3 Uji Statistik Deskriptif Penerapan Standar Akuntansi

X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	19	42.2	42.2	42.2
SS	26	57.8	57.8	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “setuju” 19 orang atau 42,2%, dan menjawab “Sangat Setuju” 36 orang atau 57,8% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,58 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
S	15	33.3	33.3	33.3
Valid SS	30	66.7	66.7	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “Setuju” 15 orang atau 33,3%, dan yang menjawab “ sangat setuju “ 30 orang maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,67 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
S	13	28.9	28.9	28.9
Valid SS	32	71.1	71.1	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “setuju” 13 orang atau 28,9% dan yang menjawab “sangat setuju” 32 orang atau 71,1% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,71 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	1	2.2	2.2	2.2
Valid S	23	51.1	51.1	53.3
SS	21	46.7	46.7	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “kurang setuju” 1 orang atau 2,2% , yang menjawab “setuju” 23 orang atau 51,1% dan yang menjawab “sangat setuju” 21 orang atau 46,7% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,44 atau rata-rata menjawab setuju.

X1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	2	4.4	4.4	4.4
S	22	48.9	48.9	53.3
SS	21	46.7	46.7	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “kurang setuju” 2 orang atau 4,4% , yang menjawab “setuju” 22 orang atau 48,9% dan yang menjawab “sangat setuju” 21 orang atau 46,7% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,42 atau rata-rata menjawab setuju.

X1.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	2.2	2.2	2.2
S	22	48.9	48.9	51.1
SS	22	48.9	48.9	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “kurang setuju” 1 orang atau 2,2% , yang menjawab “setuju” 22 orang atau 48,9% dan yang menjawab “sangat setuju” 22 orang atau 48,9% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,47 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X1.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	4	8.9	8.9	8.9
S	21	46.7	46.7	55.6
SS	20	44.4	44.4	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “kurang setuju”

4 orang atau 8,9% , yang menjawab “setuju” 21 orang atau 46,7% dan yang menjawab “sangat setuju” 20 orang atau 44,4% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,36 atau rata-rata menjawab setuju.

X1.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	4	8.9	8.9	8.9
S	17	37.8	37.8	46.7
SS	24	53.3	53.3	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “kurang setuju” 4 orang atau 8,9% , yang menjawab “setuju” 17 orang atau 37,8% dan yang menjawab “sangat setuju” 24 orang atau 53,3% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,44 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X1.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	3	6.7	6.7	6.7
S	22	48.9	48.9	55.6
SS	20	44.4	44.4	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “kurang setuju” 3 orang atau 6,7% , yang menjawab “setuju” 22 orang atau 48,9% dan yang menjawab “sangat setuju” 20 orang atau 44,4% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,38 atau rata-rata menjawab setuju.

X1.10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
S	22	48.9	48.9	48.9
Valid SS	23	51.1	51.1	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang menjawab “setuju” 22 orang atau 48,9% , dan yang menjawab “sangat setuju” 23 orang atau 51,1% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,51 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Tabel 4.4 Uji Statistik Deskriptif *Value for money***X2.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	2	4.4	4.4	4.4
Valid S	20	44.4	44.4	48.9
SS	23	51.1	51.1	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab “kurang setuju” 2 orang atau 4,4% , yang menjawab “setuju” 20 orang atau 44,4% dan yang menjawab “sangat setuju” 23 orang atau 51,1% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,47 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	16	35.6	35.6	35.6
Valid S	11	24.4	24.4	60.0
SS	18	40.0	40.0	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab “kurang setuju” 16 orang

atau 35,6% , yang menjawab “setuju” 20 orang atau 24,4% dan yang menjawab “sangat setuju” 18 orang atau 40,0% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,04 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
S	25	55.6	55.6	55.6
Valid SS	20	44.4	44.4	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab “setuju” 25 orang atau 55,6% dan yang menjawab “sangat setuju” 20 orang atau 44,4% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,44 atau rata-rata menjawab setuju.

X2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	1	2.2	2.2	2.2
Valid S	24	53.3	53.3	55.6
SS	20	44.4	44.4	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab “kurang setuju” 1 orang atau 2,2% , yang menjawab “setuju” 24 orang atau 53,3% dan yang menjawab “sangat setuju” 20 orang atau 44,4% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,42 atau rata-rata menjawab setuju.

X2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TS	1	2.2	2.2	2.2
KS	11	24.4	24.4	26.7
Valid S	14	31.1	31.1	57.8
SS	19	42.2	42.2	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab “tidak setuju” 1 orang atau 2,2%, yang menjawab “kurang setuju” 11 orang atau 24,4% , yang menjawab “setuju” 14 orang atau 31,1% dan yang menjawab “sangat setuju” 19 orang atau 42,2% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,13 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X2.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	1	2.2	2.2	2.2
Valid S	26	57.8	57.8	60.0
SS	18	40.0	40.0	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab “kurang setuju” 1 orang atau 2,2% , yang menjawab “setuju” 26 orang atau 57,8% dan yang menjawab “sangat setuju” 18 orang atau 40,0% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,38 atau rata-rata menjawab setuju.

X2.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
S	20	44.4	44.4	44.4
Valid SS	25	55.6	55.6	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab “setuju” 20 orang atau 44,4% dan yang menjawab “sangat setuju” 25 orang atau 55,6% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,56 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X2.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	6	13.3	13.3	13.3
Valid S	19	42.2	42.2	55.6
SS	20	44.4	44.4	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab”kurang setuju” 6 orang atau 13,3% ,yang menjawab “setuju” 19 orang atau 42,2% dan yang menjawab “sangat setuju” 20 orang atau 44,4% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,31 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X2.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KS	4	8.9	8.9	8.9
Valid S	18	40.0	40.0	48.9
SS	23	51.1	51.1	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab”kurang setuju” 4 orang atau 8,9% ,yang menjawab “setuju” 18 orang atau 40,0% dan yang menjawab “sangat setuju” 23

orang atau 51,1% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,42 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

X2.10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	2	4.4	4.4	4.4
S	21	46.7	46.7	51.1
SS	22	48.9	48.9	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *value for money* yang menjawab”kurang setuju” 2 orang atau 4,4% ,yang menjawab “setuju” 21 orang atau 46,7% dan yang menjawab “sangat setuju” 22 orang atau 48,9% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,44 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Tabel 4.5 Uji Statistik Deskriptif Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Y.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	2.2	2.2	2.2
S	18	40.0	40.0	42.2
SS	26	57.8	57.8	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjawab”kurang setuju” 1 orang atau 2,2% ,yang menjawab “setuju” 18 orang atau 40,0% dan yang menjawab “sangat setuju” 26 orang atau 57,8% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,56 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	2.2	2.2	2.2
S	21	46.7	46.7	48.9
SS	23	51.1	51.1	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjawab "kurang setuju" 1 orang atau 2,2% ,yang menjawab "setuju" 21 orang atau 46,7% dan yang menjawab "sangat setuju" 23 orang atau 51,1% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,49 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	2.2	2.2	2.2
S	23	51.1	51.1	53.3
SS	21	46.7	46.7	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjawab "kurang setuju" 1 orang atau 2,2% ,yang menjawab "setuju" 23 orang atau 51,1% dan yang menjawab "sangat setuju" 21 orang atau 46,7% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,44 atau rata-rata menjawab setuju.

Y.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	3	6.7	6.7	6.7
S	15	33.3	33.3	40.0
SS	27	60.0	60.0	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangann daerah yang menjawab "kurang setuju" 3 orang atau 6,7% ,yang menjawab "setuju" 15 orang atau 33,3% dan yang menjawab "sangat setuju" 27 orang atau 60,0% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,53 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	2	4.4	4.4	4.4
S	16	35.6	35.6	40.0
SS	27	60.0	60.0	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangann daerah yang menjawab "kurang setuju" 2 orang atau 4,4% ,yang menjawab "setuju" 16 orang atau 35,6% dan yang menjawab "sangat setuju" 27 orang atau 60,0% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,59 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	4	8.9	8.9	8.9
S	19	42.2	42.2	51.1
SS	22	48.9	48.9	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangann daerah yang menjawab "kurang setuju" 4 orang atau 8,9% ,yang menjawab "setuju" 19 orang atau 42,2% dan yang

menjawab “sangat setuju” 25 orang atau 48,9% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,40 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	3	6.7	6.7	6.7
S	21	46.7	46.7	53.3
SS	21	46.7	46.7	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangann daerah yang menjawab “kurang setuju” 3 orang atau 6,7% ,yang menjawab “setuju” 21 orang atau 46,7% dan yang menjawab “sangat setuju” 21 orang atau 46,7% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,40 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	2	4.4	4.4	4.4
S	19	42.2	42.2	46.7
SS	24	53.3	53.3	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangann daerah yang menjawab “kurang setuju” 2 orang atau 4,4% ,yang menjawab “setuju” 19 orang atau 42,2% dan yang menjawab “sangat setuju” 24 orang atau 53,3% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,49 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	2	4.4	4.4	4.4
S	20	44.4	44.4	48.9
SS	23	51.1	51.1	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangann daerah yang menjawab "kurang setuju" 2 orang atau 4,4% , yang menjawab "setuju" 20 orang atau 44,4% dan yang menjawab "sangat setuju" 23 orang atau 51,1% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,47 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	2.2	2.2	2.2
S	20	44.4	44.4	46.7
SS	24	53.3	53.3	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangann daerah yang menjawab "kurang setuju" 1 orang atau 2,2% , yang menjawab "setuju" 20 orang atau 44,4% dan yang menjawab "sangat setuju" 24 orang atau 53,3% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,51 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

Y.11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	3	6.7	6.7	6.7
S	14	31.1	31.1	37.8
SS	28	62.2	62.2	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjawab "kurang setuju" 3 orang atau 6,7% ,yang menjawab "setuju" 14 orang atau 31,1% dan yang menjawab "sangat setuju" 28 orang atau 62,2% maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,56 atau rata-rata menjawab sangat setuju.

4.3 Uji Validitas dan Uji Realibilitas

4.3.1 Uji validitas data

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *produc moment personcorrelation*. Data dinyatakan valid jika nilai r_{hitung} yang merupakan nilai item dari *correctedItem-Total Correlation* > dari r_{table} pada signifikansi 0,05 (5%). Berikut ini disajikan validitas dari masing-masing variabel pada tabel berikut

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	X1.1	0,635	0.294	Valid
	X1.2	0,816	0.294	Valid
	X1.3	0,727	0.294	Valid
	X1.4	0,740	0.294	Valid
	X1.5	0,858	0.294	Valid
	X1.6	0,666	0.294	Valid
	X1.7	0,817	0.294	Valid
	X1.8	0,434	0.294	Valid
	X1.9	0,813	0.294	Valid
	X1.10	0,713	0.294	Valid
Value For Money	X2.1	0,776	0.294	Valid
	X2.2	0,765	0.294	Valid
	X2.3	0,770	0.294	Valid
	X2.4	0,860	0.294	Valid
	X2.5	0,853	0.294	Valid
	X2.6	0,300	0.294	Valid
	X2.7	0,587	0.294	Valid
	X2.8	0,906	0.294	Valid
	X2.9	0,755	0.294	Valid
	X2.10	0,722	0.294	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Y.1	0,722	0.294	Valid
	Y.2	0,776	0.294	Valid

Daerah	Y.3	0,563	0.294	Valid
	Y.4	0,846	0.294	Valid
	Y.5	0,744	0.294	Valid
	Y.6	0,807	0.294	Valid
	Y.7	0,847	0.294	Valid
	Y.8	0,817	0.294	Valid
	Y.9	0,758	0.294	Valid
	Y.10	0,682	0.294	Valid
	Y.11	0,736	0.294	Valid

Sumber : Data diolah diSPSS tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa semua item pernyataan untuk semua variabel adalah valid. Karena nilai *Corrected Item-Correlation* > dari r tabel pada signifikan 0,05 (5%).

4.3.2 Uji realibilitas data

Reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuesioner sebagai indikator variabel. Jika jawaban responden tetap stabil dari waktu ke waktu, kuesioner dianggap dapat diandalkan. Untuk mengukur nilai reliabilitas digunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Jika *Conbach Alpha* yang dibangun > 0,60, maka dinyatakan reliabel.

Tabel 4.7 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	0,900	0,60	Reliabel
Value For Money (X ₂)	0,901	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,928	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah di SPSS tahun 2020

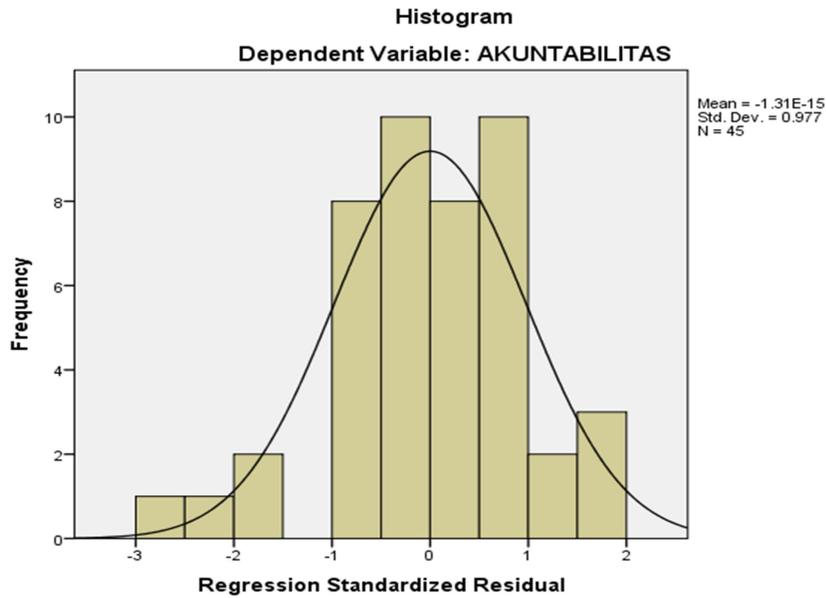
Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel, karena nilai *Cronbach Alpha* dari variabel total lebih besar dari 0,60, sehingga cocok digunakan sebagai alat ukur alat angket dalam penelitian ini

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji normalitas

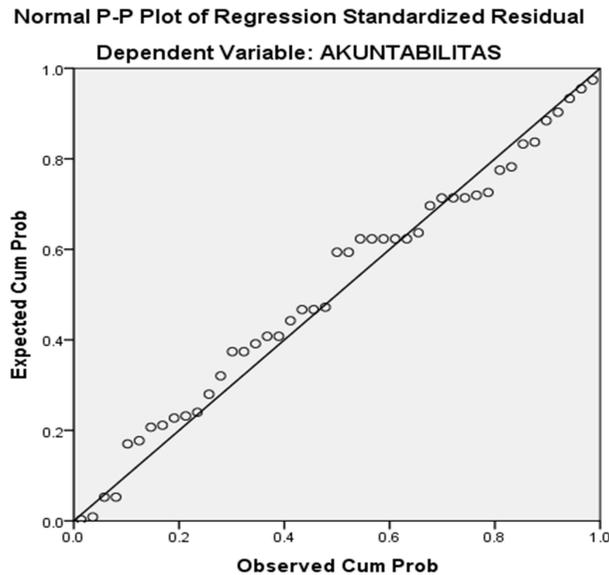
Uji normalitas Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran data yang dianalisis. Uji normalitas ini untuk menguji apakah variabel pengganggu atau variabel residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Dalam menentukan uji selanjutnya, nilai residual harus normal karena jika nilai residual tersebut tidak normal, maka uji statistik akan menjadi tidak valid. Sebagai proses untuk melaksanakan uji normalitas, penelitian ini menggunakan dua tahap dalam penentuan uji normalitas, yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov*. Berikut uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik.

Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas



Grafik di atas menunjukkan bahwa **distribusi penyebaran residual yang normal**, karena grafik tersebut tidak menunjukkan arah yang condong ke kanan maupun ke kiri. Meskipun dalam grafik tersebut terdapat beberapa residual yang melenceng dari garis, akan tetapi jumlah tersebut dimaklumi karena hanya sedikit. Selain dari grafik di atas, uji normalitas data ini juga dapat dilihat dengan menggunakan grafik normal plot dibawah ini:

Gambar 4.3 Grafik Plot Uji Normalitas



Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Dalam grafik normal plot di atas dapat diketahui **bahwa data residual dalam penelitian ini normal**. Hal tersebut terjadi karena apabila residual berasal dari distribusi yang normal, maka nilai sebaran terletak disekitar garis lurus. Pada gambar grafik di atas juga terlihat bahwa sebaran residual yang dilambangkan dengan titik atau lingkaran kecil tersebar disekeliling garis diagonal dan mengikuti arahnya sehingga, normalitas dalam penelitian ini terpenuhi.

4.4.2 Uji multikolonieritas

Uji *multikolonieritas* ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut, berikut hasil dari uji *multikolonieritas* dalam penelitian ini:

Tabel 4.8 Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.515	4.457		.789	.435		
1 Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	.536	.159	.431	3.369	.002	.385	2.596
Value For Money (X ₂)	.498	.134	.476	3.719	.001	.385	2.596

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS (Y)
 Sumber : Data yang diolah di SPSS, 2020

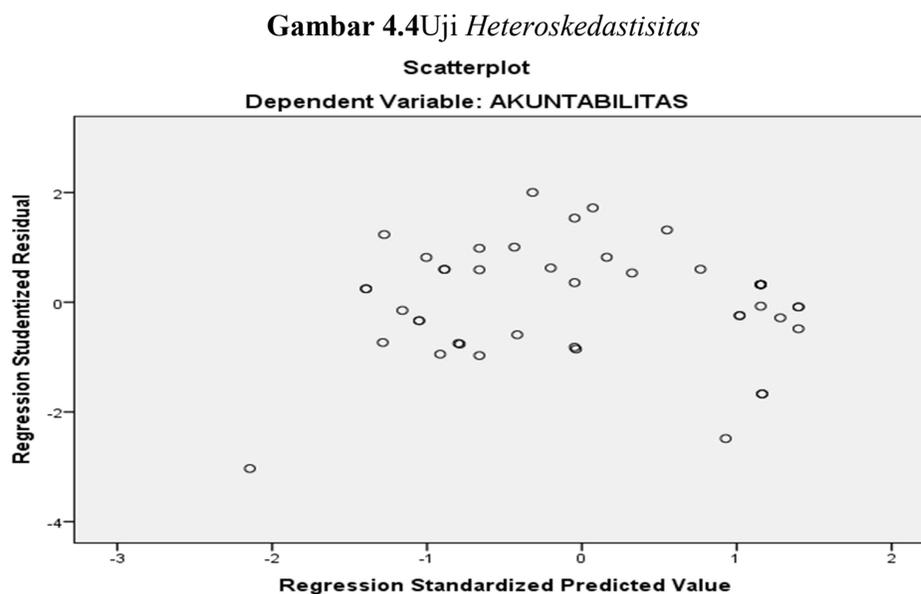
Berdasarkan hasil dari uji *multikolonieritas* yang dapat dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* yang dapat diperoleh dari masing-masing variabel adalah $>0,100$. Besar *tolerance* yang dimiliki oleh variabel tersebut adalah, variabel Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 0,385 dan variabel *Value For Money* sebesar 0,385. Sehingga nilai tersebut dapat memenuhi syarat bahwa agar tidak terjadi korelasi antar variabel independen, maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel harus $>0,100$.

Sedangkan untuk standar akuntansi pemerintahan nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah 2.596 dan *value for money* sebesar 2.596. Oleh karena itu, nilai ini juga memenuhi persyaratan lain dari uji poliklonal ini, yaitu nilai VIF harus kurang dari 10.000. Karena itu, kita bisa mengambil

Kesimpulannya **adalah tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam penelitian ini.**

4.4.3 Uji heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* adalah uji yang dilaksanakan untuk menguji apakah di dalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan *variance* residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Jika dalam *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut sebagai *homoskedastisitas*. Akan tetapi apabila dalam pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya berbeda, maka disebut *heteroskedastisitas*. Penelitian yang baik adalah penelitian yang menggunakan model regresi yang baik, yaitu dengan menggunakan model regresi yang *homoskedastisitas* atau tidak *heteroskedastisitas*. Berikut hasil pelaksanaan uji *heteroskedastisitas*:



Sumber: Data yang diolah di SPSS, 2020

Gambar di atas merupakan gambar yang diperoleh dari hasil uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Dari hasil grafik diatas terlihat titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Oleh karena itu, dengan hasil yang demikian dapat diambil kesimpulan bahwa **tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi dalam penelitian ini**. Sehingga, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menggunakan variabel independennya adalah Penerapan standar akuntansi pemerintah dan *value for money*.

Selain menggunakan grafik *scatterplot* di atas, dalam menentukan *heteroskedastisitas* ini juga menggunakan uji *glejser*. Dalam pelaksanaan uji *glejser* tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9 Uji Glejser Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5.206	2.732		1.905	.064		
1 Standar Akuntansi pemerintah	.004	.098	.011	.045	.964	.385	2.596
Value for money	-.079	.082	-.233	-.963	.341	.385	2.596

a. Dependent Variable: RES2

Pada tabel uji *glejser* di atas, nilai signifikan yang diperoleh dari uji tersebut adalah sebesar 0,964 untuk variabel standar akuntansi pemerintah dan variabel *value for money* 0,341. Nilai –nilai yang diperoleh seluruh variabel telah memenuhi syarat statistik bahwa nilai signifikan dalam uji ini harus diatas 0,05. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa **model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung adanya *heteroskedastisitas*.**

4.5 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis data dan untuk menguji perumusan hipotesis. Selain itu, analisis regresi linear berganda ini juga dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dan *value for money* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor BPKAD Kota Palopo. Hasil yang diperoleh dari proses perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.515	4.457		.789	.435
Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	.536	.159	.431	3.369	.002

Value For Money (X ₂)	.498	.134	.476	3.719	.001
-----------------------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS (Y)

Dari tabel hasil analisis regresi linear berganda di atas, diperoleh koefisien variabel bebas X₁ (Penerapan standar akuntansi pemerintah) sebesar 0,536 dan koefisien variabel bebas X₂ (*Value for money*) sebesar 0,498. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah

$$Y = 3,515 + 0,536 x_1 + 0,498 x_2 + e$$

Dimana:

- Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
 x₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
 x₂ : *Value For Money*
 e : Error

Persamaan regresi linear di atas dapat diketahui bahwa:

- Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik di atas sebesar 3,515 artinya apabila variabel penerapan standar akuntansi dan *value for money* bernilai nol maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo tetap sebesar 3,515.
- Nilai koefisien (β_1) sebesar 0,536 menunjukkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (X₁) terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) **adalah positif atau searah**, artinya

jika ditingkatkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar satu satuan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,536.

- c. Nilai koefisien (β_2) sebesar 0,498 menunjukkan bahwa *value for money* (X_2) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) **adalah positif atau searah**, artinya jika ditingkatkan variabel *value for money* sebesar satu satuan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,498.

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji koefisien determinasi adjusted (R Square)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi R^2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Koefisien Determinasi Adjusted R^2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.857 ^a	.735	.722	2.60538	1.781

a. Predictors: (Constant), Value for money, Penerapan standar akuntansi pemerintah

b. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN (Y)

Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas yang ditunjukkan oleh Adj. R^2 dari persamaan regresi menghasilkan nilai sebesar 0,722. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen yang terdiri dari penerapan standar akuntansi dan *value for money* terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar

72,2% sedangkan sisanya sebesar 27,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengartikan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.6.2 Hasil uji parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen, maka dibandingkan antara nilai thitung dengan ttabel serta membandingkan nilai signifikan t dengan *level of significant* (α). Nilai dari *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 persen (0,05). Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:40)

Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.515	4.457		.789	.435
Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	.536	.159	.431	3.369	.002

Value For Money (X ₂)	.498	.134	.476	3.719	.001
-----------------------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS (Y)

Berdasarkan data dari Tabel 4.12 diketahui nilai ttabel pada taraf signifikansi 5 % dengan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 t \text{ tabel} &= n - k - 1 : \alpha / 2 \\
 &= 45 - 3 - 1 : 0,05 / 2 \\
 &= 41 : 0,025 \\
 &= 1,640
 \end{aligned}$$

keterangan: n : jumlah

k : jumlah variabel

1 : konstan

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji statistik t untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen :

1. Hasil Pengujian Hipotesis H1

H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Untuk melihat pengaruh Penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat nilai signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig.t < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $sig.t > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dari Tabel 4.9. di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,369 > 1,640$ dan $sig.t (0,002) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Weskornis (2018), penerapan standar akuntansi pemerintahan mengharuskan semua organisasi yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait memiliki pemahaman yang utuh. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah wajib dilaksanakan, akan tetapi dalam penerapan tersebut perlu dipahami beberapa dasar pemikiran yang penting hingga diharapkan dapat membantu penerapan standar akuntansi pemerintahan. Dalam penelitian ini, penerapan standar akuntansi pemerintahan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, ini berarti jika standar akuntansi pemerintahan diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No 71 Tahun 2010 maka laporan keuangan pemerintah di Kota Palopo akan lebih berkualitas, serta juga akan berkali-kali mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Dan akuntabilitas keuangan Negara pemerintahan tersebut menjadi jelas dan lengkap.

2. Hasil Pengujian Hipotesis H2

H2: *Value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Untuk melihat pengaruh *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat nilai signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig.t < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $sig.t > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dari Tabel 4.9. di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,719 > 1,640$ dan $sig.t (0,001) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_2 **diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemakaian konsep *value for money* dapat membantu proses pengelolaan anggaran untuk menghasilkan output yang optimal dan efisien dalam pengadaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dengan biaya terendah, memelihara sumber daya serta menghindari kegiatan yang tanpa tujuan dan pengangguran sumber daya. Selain itu dengan konsep *value for money* dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerja karyawan, melaksanakan program yang dapat memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah, sistem pengendalian manajemen sudah memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau tingkat efektivitas program. Pelaporan keuangan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

4.6.3 Hasil uji simultan (Uji f)

Uji statistik F dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Hasil dari uji statistik F ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Simultan (Uji f)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	790.148	2	395.074	58.202	.000 ^b
	Residual	285.096	42	6.788		
	Total	1075.244	44			

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS

b. Predictors: (Constant), Valueformoney, Standar akuntansi Pemerintah

Pada tabel 4.13 di atas dapat dilihat nilai F sebesar 58,202 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan nilai yang jauh lebih dari 0,05. Oleh karena itu, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain bahwa, **penerapan standar akuntansi pemerintah dan *value for money* secara bersama- sama berpengaruh terhadap akuntabillitas pengelolaan keuangan daerah.**

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Hipotesis pertama penelitian ini adalah menguji apakah terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis dengan koefisien regresi (β_1) sebesar 0,536 dan memiliki nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana teori ini menjelaskan dapat menafsirkan tujuan ekonomi, pelayanan publik dan kesejahteraan dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan memberinya tanggungjawab keuangan, sehingga menjelaskan bahwa pemerintah daerah (pengelola) dapat dipercaya dan sejalan dengan kepentingan umum. Hubungan teori *stewardship* dengan standar akuntansi pemerintah ialah apabila standar akuntansi pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, maka akan berdampak pada penerapan standar keuangan pemerintah yang semakin baik dan kemampuan laporan keuangan pemerintah akan lebih berkualitas, dan akan berkali-kali. Mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Pertanggungjawaban pemerintah atas keuangan pemerintah menjadi jelas dan lengkap.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2017) dan Zeyn (2011) yang berpendapat bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena pemerintah telah mampu untuk menerapkan basis kas untuk mengakui pendapatan dan pengeluaran, serta selalu mengoreksi

setiap kesalahan dalam penyajian laporan keuangan sehingga ini menjadi bukti dari Kota Palopo yang sudah empat kali memenangkan WTP dari BPK atas pertanggungjawabannya dalam mengelola laporan keuangan.

4.7.2 Pengaruh *value for money* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Hipotesis kedua penelitian ini adalah untuk menguji apakah *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel *value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor BPKAD Palopo. Hal ini terlihat dari uji hipotesis, koefisien regresi (β_2) sebesar 0,498, dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *value for money* akan meningkatkan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. *Value for money* terkait dengan tolok ukur dalam anggaran organisasi sektor publik.

Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan dimana para manajemen tidak dimotivasi oleh tujuan pribadi, tetapi diarahkan pada tujuan utama organisasi dan diarahkan pada hasil utamanya. Pemerintah daerah sudah mampu menerapkan konsep ekonomis, efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dan sumber daya publik yang dimiliki untuk mempertanggungjawaban kepada masyarakat. Menurut Mahsun (2006: 132) *value for money* adalah evaluasi kinerja yang didasarkan pada ukuran ekonomi dan efisiensi. Dan efektivitas. Secara khusus, pemerintah daerah telah mampu

menggunakan aspek ini dalam pengelolaan keuangan daerah dan sumber daya publik yang akuntabel kepada publik. Penerapan konsep *value for money* dalam proses penggunaan anggaran dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya, dan aspek efektif penggunaan anggaran sejalan dengan visi, dan misi sasaran manfaat dapat tercapai sesuai dengan tujuan kepentingan masyarakat, sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Primayani (2014) dan Shinta (2017) yang meyakini bahwa *value for money* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi sektor publik dengan kinerja biaya tinggi akan menghasilkan target output yang baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka pengujian dan pembahasan hipotesis yaitu Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *value for money* terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor BPKAD Kota Palopo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Sehingga hipotesis pertama diterima.
2. *Value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Sehingga hipotesis kedua diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah disusun semaksimal mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya antara lain:

1. Kurangnya pemahaman dan sikap kepedulian dari responden di dalam menjawab pernyataan kuesioner yang diberikan peneliti. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi penelitian dengan metode survei wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dari responden dalam menjawab pernyataan kuesioner peneliti.

2. Peneliti hanya menggunakan dua variabel independen untuk mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan evaluasi dari keterbatasan yang ada atas hasil penelitian, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan sampel yang lebih banyak.
2. Pengumpulan data pada penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya sebatas penyebaran kuesioner saja tetapi dapat juga dilakukan dengan pengamatan, dokumentasi, observasi serta wawancara langsung ke objek penelitian.
3. Kehadiran peneliti pada saat responden melakukan pengisian kuesioner sangat ditekankan untuk memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan sesuai dengan tujuan dan apa yang diharapkan dalam penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiantara M, dan Nugraeni. (2015) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*. Vol 12 (1).
- Davis, J. H., Schoorman, F. Davi., dan Donaldson, Lex. 1997. *Towards a Stewardship Ttheory of Management*. *Academy of Management Review*, 221, 20–47.
- Donaldson, L., dan Davis, J. H. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*, 16 June 1991, 49–66.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Universitas Semarang. Semarang.
- Hasanah, Y. A., Sasongko, N., & Bawono, A. D. B. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo). *The 9th University Research Colloquium (Urecol)*, 9(5).
- <https://radarluwuraya.com>, 2019
- <https://wwwcnbcindonesia.com>, 2019)
- Ichlas, Muhammad, Hasan Basri dan Muhammad Arfan. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Kuncoro, M. 2013. *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*. Edisi keempat. Erlangga. Jakarta.
- Kurniawati, Maria Magdalena Hesti. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Jember.

- Lewier, Christy Natalia. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Skripsi:Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFY Yogyakarta
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi empat. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mulyani, S. (2018).Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, *Value For Money*, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS STIKUBANK).
- Ni Made Sudiarianti, dkk (2015) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi 18 : Medan : Universitas Sumatera Utara : Medan.
- Nunuy Nur Afiah. 2009. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan pemerintah Daerah. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nurlaila. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Enrekang). skripsi. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri N0.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Departemen Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

- Perdana Putera Esa (2019) Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kinerja Value For Money Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survey Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, Badan Pendapatan Daerah Dan Inspektorat Dipemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi).Skripsi. UNPAS.
- Podrug, N. 2011. *The Strategic Role of Managerial Stewardship Behaviour for Achieving Corporate Citizenship*. *Ekonomski Pregled*, 627–8, 404–420
- Pramudita, A. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, *Value For Money* Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Ponorogo) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Primayani, Putu Riana, et al. 2014. Pengaruh Pengendalian Internal *Value For Money* Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung). *E-Jurnal S1 Ak Vol.2, No.1*.Universitas Pendidikan Ganesha
- Purba R, B (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*. Vol 8 (1).
- RR Rinaldi (2016) .Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kota Surakarta). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Saputra Julius (2015) Pengaruh *Value For Money* {Ekonomis, Efisiensi Dan Efektivitas) Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).Skripsi.Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sayuti. 2018. Perwujudan Nilai-Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada Bappeda Kabupaten Gowa.Skripsi. Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Shintia A,E (2017) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah , Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Pengendalian Internal Dan *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi EMPIRIS Pada SKPD Kabupaten Kudus). Skripsi . Universitas Muria Kudus.
- Sugiyono, 2012.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Cetakan Ketujuh Belas. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan kedua Puluh Sembilan. Alfabeta. Bandung.
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Andi: Yogyakarta.
- Syahputra, Ricky Ari. 2018. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Value For Money*, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat). Skripsi. Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Syarifudin M, Kms (2020) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat *Value For Money* Daerah Pemerintah Kota Palembang). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah dan perubahannya. Visimedia Pustaka
- Wahida, N. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas

- Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. Skripsi. Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Wardana, Ibnu. 2016. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Magelang). Skripsi. Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- Weskornis R,T,J (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Dinas- Dinas Kabupaten Kuningan). Skripsi. Universitas Pasuruan Bandung.
- Zeyn E (2011) Pengaruh *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan. Vol.1 No. (1). Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat.